

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD



1.1 PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

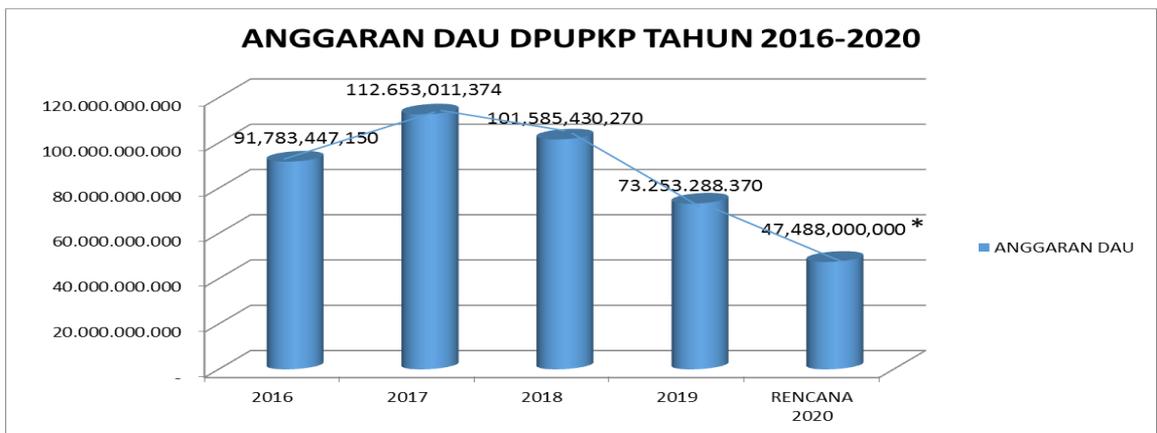
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019.



Tahun 2019 merupakan tahun ketiga bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta diatur melalui Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Diliat dari jumlah kegiatan dan jumlah anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2019 aset yang dikelola dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Rp. 1.784.076.983,00.

Tantangan akan berkurangnya jumlah pegawai, permasalahan semakin kompleks dan jumlah kegiatan yang harus dilakukan semakin banyak seiring peningkatan jumlah anggaran yang harus dilaksanakan menuntut akuntabilitas, produktifitas, efektifitas dan efisiensi yang lebih baik guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*). Anggaran kegiatan dapat dilihat pada gambar Anggaran Kegiatan DPUPKP 5 Tahun Terakhir



Diluar DAK dan Bangub

Gambar 1 . Anggaran Kegiatan DPUPKP 5 Tahun Terakhir.



1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta diatur melalui Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah merupakan salah satu dinas Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan DPUPKP berdasarkan rencana strategis bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan jasa konstruksi meliputi pengelolaan administrasi kegiatan, perencanaan kegiatan, pengelolaan operasional dan pemeliharaan, penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi jalan dan jembatan, bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman, tata kota dan jasa konstruksi serta tata ruang dan pertanahan Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dibidang pekerjaan umum;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;



- f. Pengendalian dan pembinaan dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung didukung personalia sebanyak 412 pegawai yang terdiri dari berstatus PNS dan non PNS.

Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikannya yaitu : S-2 sebanyak 9 orang, S-1 sebanyak 22 orang, D-III sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 64 orang, SLTP sebanyak 43 orang dan yang berpendidikan SD sebanyak 21 orang.

Jumlah Personil pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel I.1

Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

Nomor	Status	Jumlah
1.	PNS	167 Orang
2.	Tenaga Pendukung	245 Orang
	Jumlah	412 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Tabel I.2

Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

Nomor	Golongan	Jumlah
1.	I	46 orang
2.	II	74 orang
3.	III	39 orang
4.	IV	7 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Tabel I.3

Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Nomor	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	9 orang
2.	S 1	22 orang
3.	D III	7 orang
4.	SLTA	64 orang
5.	S M P	43 orang
6.	S D	21 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Tabel I.4

Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural

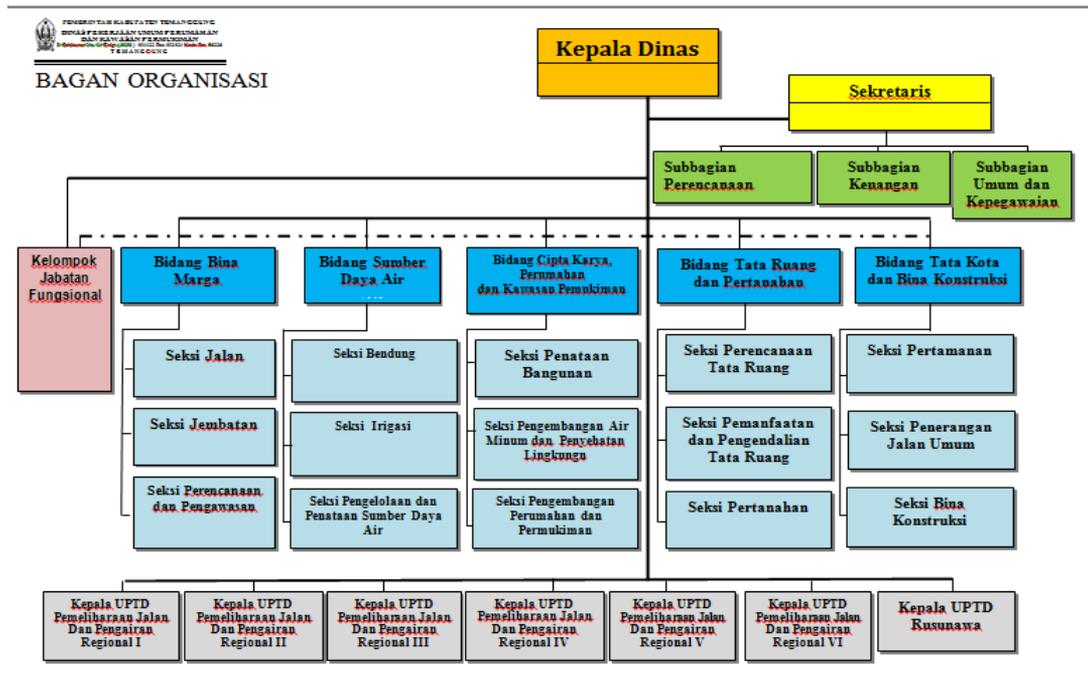
Nomor	Penjenjangan / Diklat	Jumlah
1.	SPAMA	0 orang
2.	DIKLAT PIM III	2 orang
3.	DIKLAT PIM IV	17 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung terbagi dalam struktur yang dapat dilihat dalam gambar Struktur Organisasi

Gambar 2

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung





Sementara untuk mendukung Tugas dan Fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel I.5

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah			-
	Tanah	512	Bidang	Baik
b	Peralatan dan Mesin			
	Alat - Alat Besar	24	Buah/unit	Baik
	Alat Angkut	160	Buah/unit	Baik
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	33	Buah/unit	Baik
	Alat Pertanian	3	Buah/unit	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	895	Buah/unit	Baik
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	11	Buah/unit	Baik
	Alat - Alat Kedokteran	1	Buah/unit	Baik
	Alat Laboratorium	7	Buah/unit	Baik
	Alat - Alat Persenjataan/Keamanan	0	Buah/unit	Baik
c	Golongan Gedung dan Bangunan			
	Bangunan dan Gedung	50	Unit	Baik
	Monumen	9	Unit	Baik
d	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan			



NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Jalan dan Jembatan	701	Unit	Baik
	Bangunan Air/Irigasi	890	Unit	Baik
	Instalasi	11	Unit	Baik
	Jaringan	8	Unit	Baik
e	Aset Tetap Lainnya			
	Buku Perpustakaan	15	Buah	Baik
	Barang Bercorak Kebudayaan	1	Buah	Baik
	Tanaman	2.612	Buah	Baik
f	Barang Ekstrakomptabel	1054	Buah	Baik

1.3 FUNGSI STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dimaksud, maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung secara umum memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dibidang melaksanakan urusan dalam bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan.

Secara singkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Penataan ruang wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Perluasan jaringan jalan dan jembatan serta pengembangan jaringan irigasi;
3. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan irigasi;



4. Memperpanjang usia konstruksi untuk jalan, jembatan dan sarana irigasi dengan melakukan pemeliharaan secara rutin;
5. Pemanfaatan secara maksimal infrastruktur yang sudah dibangun;
6. Meningkatkan prasarana untuk mencapai pemukiman layak huni;
7. Mengoptimalkan kelengkapan sarana pendukung, guna memperlancar pelaksanaan pekerjaan infrastruktur konstruksi jalan, jembatan dan pengairan;
8. Mengembangkan teknologi ke-PU-an yang tepat guna serta dapat meningkatkan keandalan mutu infrastruktur;
9. Meningkatnya pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

Tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung lebih dari satu urusan, yaitu :

1. Urusan Pekerjaan Umum meliputi antara lain :
 - a. Jalan dan jembatan
 - b. Irigasi dan air tanah
 - c. Air bersih, air limbah, drainase, dan trotoar
2. Urusan Perumahan Rakyat meliputi antara lain :
 - a. Rumah tidak layak huni
 - b. Perumahan pada daerah rawan bencana
 - c. Permukiman kumuh di kawasan perkotaan
 - d. Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman
 - e. Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)
3. Urusan Penataan Ruang meliputi antara lain:
 - a. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah
4. Urusan Pertanahan :
 - a. Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan pengadaan tanah untuk pemerintah.
 - b. Penyelesaian masalah pertanahan.



1.4 PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Adapun permasalahan utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, dan pertanahan secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Permasalahan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:
 - Masih belum optimal waktu pelaksanaan pekerjaan dari pelelangan sampai akhir pekerjaan.
 - Belum optimalnya kemampuan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang disebabkan keterbatasan SDM dan keuangan.
2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini didukung dengan kondisi sarana prasarana sama dengan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:
 - Penanganan RTLH yang kurang terkonsep, strategi penanganan antar Perangkat daerah belum terpadu.
 - Pemahaman RTLH belum memasyarakat.
3. Adapun permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah:
 - Koordinasi antara sektor utamanya pemerintah provinsi Jawa Tengah, kantor pertanahan, perum perhutani dan Kementerian ATR yang sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama dan tidak sedikit.
4. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pendukung Urusan Perangkat Daerah ini didukung dengan kondisi sarana prasarana sama dengan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan adalah belum ada data terintegrasi untuk satu Dinas.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini, Telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

2.1 RENCANA STRATEGIS

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.



1. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

DPUPKP selaras dengan dan terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu :

Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi sebagai berikut:

- Mengembangkan Memberdayakan dan Melestarikan Infrastruktur Transportasi Darat, Irigasi dan Sumber Daya Air;
- Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Memadai, Serasi dan Berkelanjutan;
- Mewujudkan Managemen yang Profesional di Bidang Pembangunan untuk Urusan urusan dalam bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan.





Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung menurut misi 2 (dua) dalam RPJMD.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Dua) RPJMD Tahun 2019

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi 2 (Kedua): Mewujudkan Pmberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan			
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	1.1	Peningkatan persentase infrastruktur wilayah kondisi baik
		1.2	Peningkatan persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		1.3	Penurunan persentase kawasan kumuh perkotaan



2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA



Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPUPKP Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	
1.	Meningkatnya Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	1	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)
		2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung
		3	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik
		4	Persentase jaringan irigasi kondisi baik
		5	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan
		6	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	
2.	Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	1	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana
		2	Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan
		3	Prosentase Kawasan Strategis yang dikembangkan
		4	Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar parakan
3.	Menurunnya Kawasan kumuh perkotaan	1	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak
		2	Persentase rumah layak huni
		3	Persentase kawasan kumuh perkotaan
		4	cakupan RTH publik
		5	Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Temanggung

No	Sasaran setrategis	Program	Penanggung jawab
1	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1		Penyelenggaraan jalan	Bidang Bina Marga
2		Penyelenggaraan jembatan	Bidang Bina Marga
3		Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Bidang Sumber Daya Alam
4		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Bidang Sumber Daya Alam
		Penyelenggaraan tata ruang	Bidang Tata Ruang
5		Pengembangan kawasan strategis	Bidang Tata Ruang
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1		Program pengembangan perumahan dan permukiman	Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman



No	Sasaran setrategis	Program	Penanggung jawab
2		Program Pengembangan Dan Penataan Kota	Bidang Tata Kota dan Bina Kosntruksi
3		Program pembinaan Jasa Konstruksi	Bidang Tata Kota dan Bina Kosntruksi
PERTANAHAN			
1		Program Administras Pertanahan	
PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH			
1		Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	
2		Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	
3		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	
4		Program disiplin aparatur	

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah



berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2019 serta kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan APBD TA 2019. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	TARGET 2019	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	1	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	%	84.25%
		2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten Temanggung	%	100%
		3	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik	%	92.54%
		4	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	57.32%
		5	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	46%
		6	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90%
2.	Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	1	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana		87,70 %
		2	Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100%
		3	Prosentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	%	0
		4	Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar parakan	%	0



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	TARGET 2019
1	2	3	4	5
3.	Menurunnya Kawasan kumuh perkotaan	1 Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak 2 Persentase rumah layak huni 3 Persentase kawasan kumuh perkotaan 4 cakupan RTH publik 5 Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	% % % % %	86% 85,15% 19,25 % 0,07% 8.85 %

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 128.269.736.843,00 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 14.364.056.073,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 113.905.680.770,00.

Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis



Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	RENSTRA	RENJA	APBD
1	2	3	4	5	6
1	- Persentase jalan kabupaten kondisi mantab (baik dan sedang) - persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten Temanggung	Penyelenggaraan jalan	64,449,458,000	33,276,500,000	54,473,085,900
2	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Penyelenggaraan jembatan	11,980,000,000	11,980,000,000	14,419,031,300
3	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10,421,000,000	10,421,000,000	14,303,639,300
4	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3,925,000,000	3,925,000,000	1,853,355,500
5	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	Pembinaan jasa konstruksi	50,000,000	50,000,000	40,994,900
6	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	Penyelenggaraan tata ruang	650,000,000	650,000,000	254,155,200
7	Persentase kawasan strategis yang dikembangkan	Pengembangan kawasan strategis	-	-	-
8	- Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak - Persentase rumah layak huni - Persentase kawasan kumuh	Program pengembangan Rumah Sehat	6,988,000,000	4,400,000,000	4,940,752,900



No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	RENSTRA	RENJA	APBD
1	2	3	4	5	6
	perkotaan				
9	- Cakupan RTH Publik - Persentase penerangan jalan umum di luar jalan kabupaten	Program Pengembangan Dan Penataan Kota	26,400,000,000	25,980,000,000	21,247,800,270
10	- Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan - Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar Parakan	Program Administrasi Pertanahan	1,600,000,000	1,600,000,000	215,251,500
11	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	5,000,000	-	5,000,000
12	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,509,200,000	1,509,200,000	979,967,300
13	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,077,556,700	1,960,000,000	1,174,196,300



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun



2015-2018. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian > 100,00%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, setidaknya terdapat 15 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :



Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	INDIKATOR SASARAN	Sat	TAHUN 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	%
1	Persentase jalan kabupaten kondisi Mantap (baik dan sedang)	%	84.25	89.15	100
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung	%	100	100	100
3	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	92.54	91.39	98.76
4	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	57.32	57,41	100
5	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	46	46.136	100
6	Tersedianya layanan informasi jasa kontruksi	%	90	90	100
7	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	87.70	87.70	100



No	INDIKATOR SASARAN	Sat	TAHUN 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	Realisasi	%
8	Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan	%	100	100	100
9	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	%	0.00	0	0.00
10	Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar	%	0	0	0.00
11	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak	%	86	86.73	100
12	Persentase rumah layak huni	%	87.15	88.32	100
13	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	19.25	11.21	100
14	Cakupan RTH publik	%	0.07	0.07	100.00
15	Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	%	8.85	31.6	100
	jumlah				

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Temanggung Tahun 2019

No	INDIKATOR SASARAN	Sat	CAP.2018	TAHUN 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	RENSTRA 2019 - 2023 (IKPD)		CAPAIAN KINERJA TAHUN terhadap target 2023
				Target	Realisasi		target akhir 2023	realisasi 2019	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6		
1	Persentase jalan kabupaten kondisi Mantap (baik dan sedang)	%	84.2	84.25	89.15	100	85	89.15.	100.00
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung	%	100	100	100	100	100	100	100.00
3	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	92	92.54	91.39	98.76	93.13	91.39	98.76
4	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	55.8	57.32	57,41	100	58.32	57,41	96,78
5	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	41	46	46.136	100	50	46.136	92.23
6	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	100	90	90	100.00	90	100	100
7	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	87.60	87.70	87.70	100	88.10	87.70	99.95
8	Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100



No	INDIKATOR SASARAN	Sat	CAP.2018	TAHUN 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	RENSTRA 2019 - 2023 (IKPD)		CAPAIAN KINERJA TAHUN terhadap target 2023
				Target	Realisasi		target akhir 2023	realisasi 2019	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6		
9	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	%	0	0.00	0	0.00	60	0.00	0.00
10	Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar	%	0	0	0	0.00	100	0	0.00
11	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak	%	85.8	86	86.73	100	90	86.73	96.37
12	Persentase rumah layak huni	%	86.8	87.15	88.32	100	89.42	88.32	98.77
13	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	19.5	19.25	11.21	100	18.25	11	100
14	Cakupan RTH publik	%	0.07	0.07	0.082	100	0.07	0.082	100
15	Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	%		8.85	31.6	100	14.26	31.6	100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Persentase jalan kabupaten kondisi Mantap (baik dan sedang) dengan capaian **89.14%.pencapaian indikator** utama iku untuk prosentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang) dengan capaian kinerja 100% kategori memuaskan. dengan kategori **Sangat Baik**.

Panjang jalan di Kabupaten Temanggung seluruhnya 650.476 km berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 050/405 Tahun 2018 tentang



Ruang-ruas Jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten tanggal 22 November 2018 . Pencapaian pembangunan dan pemeliharaan jalan yang baik pada tahun 2019 sepanjang 579,87 km atau 89,14%. Kondisi kelayakan jalan dapat diukur berdasarkan peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tatacara, persyaratan, dan penetapan laik fungsi jalan. Berdasarkan peraturan tersebut, kondisi jalan di Kabupaten Temanggung dapat disebut dalam kondisi mantap (baik dan sedang)

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

a) Factor penghambat :

- Penganggaran
- Belum optimalnya kualitas pelayanan jalan

b) Factor pendorong :

- Keinginan masyarakat.
- Adanya kebutuhan terhubungnya pusat kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.4
Jalan Kabupaten Berkondisi Baik
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019

Tahun	Jalan Kabupaten (km)		
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Mantap (Baik & Sedang) (km)	%
2014	739,127	504,313	68,23
2015	739,127	552,818	74,79
2016	739,127	566,488	76,64
2017	739,127	607,25	82,16
2018	739,127	621,992	84,15
2019	650,467	579.87	89.14

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2019



Dari tabel di atas, jalan kabupaten kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2018 cenderung meningkat karena adanya program peningkatan dan pemeliharaan jalan serta adanya dukungan program dari provinsi maupun pusat. Tetapi pada tahun 2019 semester II total panjang jalan kabupaten adalah 650,467 km. Panjang jalan kabupaten berkurang karena ada berubah status ruas jalan kabupaten yang menjadi jalan desa yang menjadi kewenangan desa.

2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung

Definisi dari pusat kegiatan disini adalah Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Rumus untuk memperoleh Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Temanggung jumlah Panjang jalan Kabupaten yang menghubungkan pusat kegiatan yang terhubung dibagi total panjang jalan kabupaten dikalikan 100%. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk presentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung dengan capaian 100 % berkategori **memuaskan**.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

1. Faktor penghambat :

- -

2. Faktor pendorong :

- Adanya kebutuhan terhubungnya pusat kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung.



Table 3.5
Jalan Penghubung Pusat-Pusat Kegiatan
di Wilayah Kabupaten Temanggung

Tahun	Jalan Kabupaten (km)		
	Panjang Jalan (km)	Jalan Penghubung (km)	Persentase (%)
2013	739,127	739,127	100
2014	739,127	739,127	100
2015	739,127	739,127	100
2016	739,127	739,127	100
2017	739,127	739,127	100
2018	739,127	739,127	100
2019	650,467	650,467	100

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2019

Dari data Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa seluruh Pusat kegiatan Lokal dalam hal ini antar kecamatan telah didukung dengan jaringan jalan yang memadai. Dan kesemuanya adalah jalan kewenangan kabupaten.

3. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Jembatan kabupaten berkondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2018 cenderung meningkat. Kondisi jembatan pada Tahun 2019 dari total 337 unit jembatan yang ada terdapat 308 unit jembatan berkondisi baik atau setara dengan 90 %. Jumlah Jembatan bertambah karena ada aset jembatan yang diserahkan ke Dinas PUPKP.



Tabel 3.6
Jembatan Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2013-2019

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
2013	334	276	82
2014	334	282	84
2015	334	283	84
2016	334	285	85
2017	334	302	90
2018	334	309	92
2019	337	308	91,39

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2019

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

a) Factor penghambat :

- Keterbatasnya anggaran
- Belum optimalnya kualitas pelayanan jalan

b) Factor pendorong :

- Keinginan masyarakat.
- Adanya kebutuhan terhubungnya pusat kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung.
- Adanya program pembangunan Jembatan, Pelebaran Jembatan, Rehabilitasi Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang dilakukan sebagai bagian pembangunan Kebina-Margaan yang menjadi Prioritas Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4. Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Daerah Irigasi kabupaten Temanggung kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2018 cenderung meningkat, dari total 577 DI yang ada terdapat 347 DI berkondisi baik capaian 60,14 %



Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik dengan capaian 100 % berkategori **memuaskan**.

Penyediaan air irigasi untuk pertanian di Kabupaten Temanggung didukung kondisi alam yang berkontur miring dan mempunyai sumber daya air yang mencukupi. Sehingga walaupun masih ada saluran irigasi non teknis namun ketersediaan air irigasi masih mencukupi. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung mampu mengairi lahan seluas 13.463,38 hektar.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

a) Faktor penghambat :

- Rawan Bencana

b) Faktor pendorong :

- Terbangunnya saluran irigasi yang baik.

5. Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan.

Walaupun jumlah saluran drainase yang terbangun masih belum maksimal namun Pada dasarnya kondisi drainase di Kabupaten Temanggung sangat terbantu dari kondisi kemiringan wilayah yang ada, sehingga sangat jarang terjadi adanya genangan air atau terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan dengan capaian 100 % berkategori **memuaskan**.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

a) Faktor penghambat :

- Kondisi lingkungan/ kawasan

b) Faktor pendorong :

- Tuntutan daerah bebas banjir



Tabel 3.7
Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan

No.	Uraian	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jaringan drainase pada skala kawasan/kota		6046	296,39	297,87	300,09	303,04	303,04
2	Panjang jalan kabupaten skala kawasan/kota umlah rumah berakses air minum layak		739,127	739,127	739,127	739,127	739,127	650,467
3	Persentase (%)		8.18	40,1	40,3	40,6	41	46,5

6. Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Tersedianya informasi jasa konstruksi setiap tahun dapat tercapai didukung faktor pendorong dari kegiatan dari tingkat pusat dan Provinsi yang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap update data yang dilakukan.

Sedangkan Faktor yang jadi penghambatnya adalah belum semua Penyedia Jasa Konstruksi memanfaatkan data dalam aplikasi SIPJAKI secara optimal.

Tabel 3.8
Layanan Informasi Jasa Konstruksi

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	jumlah layanan minimal sistem informasi jasa	7	7	7	7	7	7	7



No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.	jumlah layanan minimal sistem informasi jasa	7	7	7	7	7	7	7
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi dengan capaian 100 % berkategori **memuaskan**.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

a) Faktor penghambat :

- -

b) Faktor pendorong :

- Tuntutan akan masyarakat dan rekanan mengenai pelayanan info jaskon

7. Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

Kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung berada di kawasan perkotaan Temanggung, Parakan, Ngadirejo dan Kranggan. Dari total luas permukiman perkotaan seluas 1507,32 Ha, terdapat lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh seluas 169,00 Ha. Data tersebut berdasar SK Kawasan Kumuh terbaru.

Table 3.9
Persentase Luasan Kumuh Permukiman Perkotaan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2019

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Kawasan Kumuh	376,11	368,51	358,41	333,21	297,81	293,99	169
2.	Luasan Perukiman Perkotaan	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1507,32
3.	Persentase	24,95	24,45	23,78	22,11	19,75	19,5	11

Sumber : DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase luasan kumuh permukiman perkotaan selama 5(lima) tahun terakhir cenderung menurun dari 24,95 % pada tahun 2013 menurun menjadi 19,5 % pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 luasan kumuh dari 19,5% turun menjadi 11%.

Keberhasilan pencapaian penurunan kawasan Kumuh ini didukung adanya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang bersumber dana dari APBN dan APBD sebagai pendamping.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan pencapaian 100 % berkategori **memuaskan**.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

a) Faktor penghambat :

- Sulitnya pembebasan lahan.
- Kurang kepedulian masyarakat
- Keterbatasan anggaran dari APBD.

b) Faktor pendorong :

- Program terpadu keciptakarya bidang sanitasi.

8. Persentase Rumah Layak Huni

Tabel 3.10
Persentase Rumah Layak Huni
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Semester I
1.	Jumlah rumah layak huni	157.258	156.848	158.515	166.801	170.023	175.731	179.156
2.	Jumlah	193.096	194.116	195.368	196.385	198.785	204.313	2902.851



No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Semester I
	rumah							
3.	Persentase	81,4%	80,8%	81,13%	82%	85,53%	86,0%	88,32%

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun persentase rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk persentase rumah layak huni capaian 100 % berkategori **memuaskan**.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

a) Faktor penghambat :

- Kurangnya dukungan CSR untuk RTLH
- Masih banyak MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

b) Faktor pendorong :

- Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam penanganan RTLH Program Bansos RTLH.

9. Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK)

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang menjadi target capaian adalah cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK).

Realisasi cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 belum ada karena merupakan indikator baru pada RPJMD 2018-2023.

Luas administratif kota 7,21 Km² (7.210.000m²) berbanding luas Taman Kota 78.128,31 m² adalah 1,08 %. Untuk memenuhi persentase ideal 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan dibutuhkan paling tidak 1.442.000m².



Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik capaian 100 % berkategori **memuaskan**.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

a) Faktor penghambat :

- Ketersediaan lahan yang dimiliki oleh pemda

b) Faktor pendorong :

- Kebutuhan konsepsi kota dan sosial
- Telah tersedianya masterplan RTH Kabupaten

Tabel 3.11
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Ibu Kota Kecamatan

No	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	No.	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS
1	2	3	4	1	2	3	4
I TAMAN KOTA				III PULAU JALAN			
1	Alun-alun	Alun-alun kota Temanggung	10.465,37 M2	23	Tugu Adipura	Jl Lingkar Setda Temanggung	51,00 M2
2	Taman Pancasila	Jl Jend Sudirman Temanggung	985,20 M2	24	Tugu Pancasila	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	8,75 M2
3	Taman Bendo	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.050,00 M2	25	Pulau Jalan Subur	Pertigaan Jl Diponegoro Tmg	96,43 M2
4	Taman Kr Tumaritis	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.373,95 M2	26	Pulau Jalan Sri Suwarno	Pertigaan Jl Sri Suwarno Tmg	68,25 M2
5	Taman Gedung DPRD	Jl Lingkar Alun-alun Temanggung	243,00 M2	27	Pulau Jalan Telkom	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	67,12 M2
6	Taman Pandean	Jl MT Haryono Temanggung	16,00 M2	28	Pulau Jalan Kranggan	Pertigaan pasar Kranggan	30,86 M2
7	Taman Siklontong	Jl Dr Wahidin Temanggung	101,46 M2	29	Pulau Jalan RSBG	Pertigaan RSBG Temanggung	20,10 M2
8	Taman Brojolan	Jl Diponegoro Temanggung	261,80 M2	30	Pulau Jalan Pasar Parakan	Pertigaan Pasar Legi Parakan	63,80 M2
9	Taman Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.236,75 M2	JUMLAH III			406,31 M2
10	Taman Boulevard Stadion	Jl Jend Sudirman Temanggung	320,00 M2	IV JALUR HIJAU			
11	Taman Eks Kerkoff	Jl Suyoto Temanggung	414,00 M2	31	Jalur Hijau Jl Hayam Wuruk	Jl Hayam Wuruk Temanggung	240,00 M2
12	Taman Eks Stasiun I	Jl Lingkar Setda Temanggung	722,00 M2	32	Jalur Hijau Jl Gajahmada	Jl Gajahmada Temanggung	1.665,71 M2
13	Taman Eks Stasiun II	Jl Lingkar Setda Temanggung	141,00 M2	33	Jalur Hijau Jl Diponegoro	Jl Diponegoro Temanggung	460,30 M2
14	Taman Pramuka	Jl Lingkar Setda Temanggung	59,50 M2	34	Jalur Hijau Jl Sudirman I	Jl Jend Sudirman Temanggung	258,40 M2
15	Taman Jago	Jl WR Supratman Temanggung	67,50 M2	35	Jalur Hijau Jl Sudirman II	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.160,00 M2
16	Taman Kali Progo	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	7.196,20 M2	36	Jlr Hijau Jl Suwandi Suwardi	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	- M2
17	Taman Pikatan	Pertigaan Jl. Pahlawan Temanggung	630,00 M2	37	Jalur Hijau Jl R. Suprpto	Jl R. Suprpto Temanggung	258,00 M2
18	Taman Bambu Runcing Parakan	Jl Kosasih Parakan	17.520,00 M2	38	Jalur Hijau Jl S Parman	Jl S. Parman Temanggung	434,00 M2
19	Taman Kali Galeh	Jl. Suwaji Parakan	7.034,00 M2	39	Jalur Hijau Jl Tent. Pelajar	Jl Tentara Pelajar Temanggung	234,00 M2
20	RTP Gondang Winangun	Gondangwinangun Ngadirejo	10.000,00 M2	40	Jalur Hijau Jl Ahmad Yani	Jl Ahmad Yani Temanggung	50,00 M2
			JUMLAH I	41	Jalur Hijau Jl Suyoto	Jl Suyoto Temanggung	369,00 M2
			59.837,73 M2	42	Jalur Hijau Jl Raya Kranggan	Jl Raya Kranggan - Temanggung	1.102,40 M2
II HUTAN KOTA				43	Jalur Hijau Jl Letnan Suwaji Parakan	Jl Letnan Suwaji Parakan	615,95 M2
21	Hutan Kota Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	9.450,00 M2	44	Jalur Hijau Jl Katamsa Parakan	Jl Katamsa Parakan	86,51 M2
22	Hutan Kota Gumuk Godek	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.500,00 M2	JUMLAH IV			6.934,27 M2
			JUMLAH II	JUMLAH SELURUHNYA (I+II+III+IV)			78.128,31 M2
			10.950,00 M2				

10. Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten dihitung dengan membagi jumlah PJU dengan Jumlah Ruas Jalan Kabupaten dikalikan 100%



Realisasi Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 belum ada karena merupakan indikator baru pada RPJMD 2018-2023. Panjang jalan kabupaten yang sudah ber-PJU sampai dengan tahun 2018 adalah 55,43 Km. Untuk realisasi di semester II 2019 persentase penerangan jalan umum tercapai 31,7%. Dengan perhitungan setiap 50 meter terdapat 1 LPJU sedangkan panjang jalan kabupaten adalah 650.476. sehingga jumlah lampu penerangan jalan umum adalah 4127 dibagi panjang jalan dibagi 50.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten capaian 100 % berkatagori **memuaskan**.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

c) Faktor penghambat :

- -

d) Faktor pendorong :

- Tuntutan masyarakat akan kebutuhan LPJU.

11. Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak

Table 3.12
Rumah Berakses Sanitasi Layak Tahun 2013-20189

No.	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Semester II
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak		129.067	136.581	154.280	159.147	162.853	162.853
2	Jumlah rumah		194.116	195.368	196.385	198.785	204.313	204.313
3	Persentase		66,49	69,91	78,56	80,06	79,7	79,7

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2019 Semester II



Berdasarkan tabel di atas, persentase rumah tinggal bersanitasi layak selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat, dari 66,49% menjadi 80,06% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 sedikit menurun menjadi 79,7% karena walaupun Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak bertambah namun peningkatan jumlah rumah juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung selalu meningkat. Ditahun 2019 semester I masih sama dengan akhir tahun 2018 karena semua kegiatan dilaksanakan.

Keberhasilan peningkatan Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak didukung oleh program nasional 100-0-100. Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi. Walaupun belum tercapai 100% seluruh rumah tinggal kabupaten Temanggung berakses sanitasi layak namun program ini telah menunjukkan keberhasilan peningkatan jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas sanitasi layak. Faktor pendorong yang lain adalah Kabupaten Temanggung sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Air Limbah, Kebijakan Pemerintah Pusat tentang universal access, adanya program penataan kawasan (KOTAKU).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten capaian 100 % berkatagori **memuaskan**.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

e) Faktor penghambat :

- -

f) Faktor pendorong :

- Adanya Peraturan Daerah tentang Air Limbah, Kebijakan Pemerintah Pusat tentang universal access, adanya program penataan kawasan (KOTAKU).



12. Rumah Berakses Air Bersih

Tabel 3.13
Rumah Berakses Air Minum Layak

No.	Uraian	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Semester II
1	Jumlah rumah berakses air minum layak		139.472	145.861	163.254	164.335	173661	191.027
2	Jumlah rumah		194.116	195.368	196.385	198.785	204.313	220.249
3	Persentase (%)		71,85	74,66	83,13	82,67	84,99	86,73

Sumber : DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase rumah dengan akses air minum layak selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dari 71,85 % menjadi 86,73 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari ketersediaan air minum layak, Kabupaten Temanggung telah memenuhi standar pelayanan minimal air minum.

Kebutuhan air minum yang disalurkan oleh PDAM di Kabupaten Temanggung tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tercatat jumlah air yang disalurkan sebesar 9.810.573 m³ dengan nilai sebesar 17.559.029 rupiah. Dengan jumlah pelanggan tahun 2017 sebanyak 39.027 dengan pelanggan terbesar dari jenis rumah tangga. Jumlah mata air yang dikelola PDAM Kabupaten Temanggung ada 21 mata air dan tersebar di 9 lokasi. Kapasitas terpasang 507 liter/detik dengan realisasi 378,47 liter per detik.

13. Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan

Penyelesaian Fasilitas Pertanahan adalah Program untuk Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.



Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan dihitung dengan membagi jumlah kasus pertanahan yang diajukan dibagi jumlah kasus yang difasilitasi dibagi 100%.

Realisasi Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 belum ada karena merupakan indikator baru pada RPJMD 2018-2023.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanah pencapaian 100 % berkategori **memuaskan**.

Faktor – faktor pendukung diatas antara lain adalah :

g) Faktor penghambat :

- -

h) Faktor pendorong :

- Usulan dari masyarakat tentang fasilitas pertanahan.

3.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 dapat dilihat dari table sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran

NO	PREDIKAT	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	
1	2	3	4	
1.	MEMUASKAN	11	1	Persentase jalan kabupaten kondisi Mantap (baik dan sedang)
			2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung
			3	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan



NO	PREDIKAT	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	
1	2	3	4	
			4	Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan
			5	Persentase kawasan kumuh perkotaan
			6	Cakupan RTH publik
			7	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi
			8	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang
			9	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak
			10	Persentase rumah layak huni
			11	Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten
2	SANGAT BAIK	2	1	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik
			2	Persentase jaringan irigasi kondisi baik
3	BAIK	0		
4	CUKUP	0		
5	KURANG	0		
JUMLAH		13		

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.15
Pencapaian Sasaran

No	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Sat	TAHUN 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
					Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	7= 6/5*100
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	1	Persentase jalan kabupaten kondisi Mantap (baik dan sedang)	%	84.25	89.15	100
		2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung	%	100	100	100.00
		3	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	92.54	91.39	98.76
		4	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	57.32	57,41	100
		5	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	46	46.13	100
		6	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	90	100	100
2	Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	1	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	87.70	87.70	100
		2	Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan	%	100	100	100



No	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	TAHUN 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7= 6/5*100	
		3	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	%	0.00	0	0.00
		4	Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar	%	0	0	0.00
3	Menurunnya Kawasan Kumuh Perkotaan	1	Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak	%	86	86.73	100
		2	Persentase rumah layak huni	%	87.15	88.32	100
		3	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	19.25	11.21	100
		4	Cakupan RTH publik	%	0.07	0.07	100
		5	Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten	%	8.85	31.6	100

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 128.269.736.843,00 setelah perubahan Anggaran tersebut bersumber dari APBD secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- Belanja Langsung, sebesar Rp. 113.905.680.770,00
- Belanja tidak langsung Rp 14.364.056.073,00



1) Urusanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
RuangTahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
1	Program penyelenggaraan jalan	54.473.085.900	45.107.335.295	72,14
a	Peningkatan Jalan Kabupaten	9.622.634.100	8.878.487.375	92,27
b	Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK)	98.218.000	96.329.000	98,08
c	Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan	48.221.300	45.156.300	93,64
d	Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan	10.840.612.800	9.175.213.383	84,64
e	Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan	794.828.500	773.243.509	97,28
f	Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan	155.613.200	139.429.663	89,60
g	Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	81.979.000	69.211.978	84,43
h	Pembangunan Jalan Kabupaten	1.570.000.000	1.384.541.319	88,19
i	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan	12.014.979.000	9.895.463.214	82,36
j	Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan	14.000.000.000	11.857.983.667	84,70
k	Fasilitasi DAK Penugasan Jalan	120.000.000	91.844.929	76,54
l	Fasilitasi DAK Reguler Jalan	126.000.000	105.209.693	83,50
m	Pelebaran Jalan Kandangan-Tegong	5.000.000.000	4.015.758.000	80,32
2	Program penyelenggaraan jembatan	14.419.031.300	13.060.433.174	90,58
a	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	48.711.800	48.109.800	98,76
b	Perencanaan Peningkatan Jembatan	147.728.000	145.413.900	98,43



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
c	Peningkatan Jembatan	900.614.700	678.670.432	75,36
d	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1.373.587.600	1.102.861.772	80,29
e	Pembangunan Jembatan	7.000.000.000	6.752.034.907	96,46
f	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	4.948.389.200	4.333.342.363	87,57
3	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	14.303.639.300	11.988.665.728	83,82
a	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	196.168.800	156.656.279	79,86
b	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	1.528.881.300	1.481.627.619	96,91
c	Fasilitasi Komisi Irigasi dan DAS	28.816.500	5.349.500	18,56
d	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	2.590.896.400	2.012.736.359	77,68
e	Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	57.743.300	39.832.500	68,98
f	Penyusunan DED Irigasi	94.639.600	89.972.400	95,07
g	Pemetaan Jaringan Irigasi	196.467.600	184.607.839	93,96
h	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	2.414.132.400	1.861.619.687	77,11
i	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air	42.980.000	38.796.400	90,27
j	Fasilitasi Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal	28.750.400	18.539.300	64,48
k	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi	7.124.163.000	6.099.053.845	85,61
4	Program pembangunan saluran drainase/gorong – gorong	1.853.355.500	1.485.216.962	80,14
a	Review Masterplan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Kota Temanggung	93.989.000	89.697.500	95,43
b	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	1.116.314.700	870.039.485	77,94
c	Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	494.560.800	383.749.677	77,59
d	Penyusunan DED Drainase	148.491.000	141.730.300	95,45



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
5	Program penyelenggaraan tata ruang	254.155.200	220.569.192	86,79
a	Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa	82.643.100	72.698.643	87,97
b	Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung	84.524.600	70.303.499	83,18
c	Penyusunan Review Raperda RTRW dan Sosialisasi	61.450.000	55.356.619	90,08
d	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	25.537.500	15.346.931	60,10
TOTAL		85.301.808.200	73.276.055.586	85,90

2) Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 adalah sebagai berikut

Tabel 3.17

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Program pengembangan perumahan dan permukiman	4.940.752.900	4.341.153.534	87,86
a	Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	185.095.000	179.792.228	97,14
b	Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa	390.235.700	356.617.911	91,39
c	Penyusunan Perda Tarif Rusunawa Kab.	23.356.000	3.927.500	16,82



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	Temanggung			
d	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	93.820.500	92.046.550	98,11
e	Pengadaan PSU Rusunawa	747.242.000	691.721.330	92,57
f	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	448.127.100	364.041.400	81,24
g	Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	158.707.100	153.244.366	96,56
h	Pendataan dan DED Air Bersih	165.945.000	163.820.000	98,72
i	Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	174.908.100	135.381.562	77,40
j	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	130.431.500	124.024.884	95,09
k	Pembangunan IPAL Komunal	111.900.000	107.434.750	96,01
l	Fasilitasi BSPS	37.747.600	-	-
m	Fasilitasi RTLH Provinsi	38.900.000	38.502.411	98,98
n	Revitalisasi IPAL Komunal	1.062.087.300	959.214.649	90,31
o	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Air Minum	945.000.000	755.528.500	79,95
p	Fasilitasi DAK Penugasan Air Minum	20.000.000	16.518.600	82,59
q	Fasilitasi DAK Reguler Sanitasi	35.000.000	31.235.743	89,24
r	Fasilitasi DAK Reguler Perumahan Permukiman	41.000.000	38.978.400	95,07
s	Penunjang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	131.250.000	129.122.750	98,38
2	Program pengembangan dan penataan kota	21.247.709.970	18.128.361.848	85,32
a	Penataan dan Pemeliharaan RTH	972.660.000	892.621.998	91,77
b	Pemeliharaan Taman	1.385.927.000	1.276.244.855	92,09
c	Pengadaan lampu Kota	994.619.650	985.145.249	99,05
d	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	997.284.000	989.965.416	99,27



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	(LPJU)			
e	Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum	1.491.554.420	1.443.376.586	96,77
f	Pembayaran Rekening LPJU	12.496.856.000	9.822.525.616	78,60
g	Pembangunan Trotoar	949.024.700	823.108.192	86,73
h	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	990.859.000	963.488.482	97,24
i	DED Pembangunan Trotoar	97.794.800	94.592.300	96,73
j	Pengadaan Toilet Portable	30.000.000	24.011.000	80,04
k	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	93.409.900	82.768.040	88,61
l	Dana Gotong Royong Infrastruktur	747.720.500	730.514.114	97,70
3	Program pembinaan jasa konstruksi	40.994.700	29.156.913	71,12
a	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi	40.994.700	29.156.913	71,12
TOTAL		26.229.457.570,00	22.498.672.295,00	85,78

3) Urusan Bidang Pertanahan

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	URUSAN PERTANAHAN			
1	Program Administrasi Pertanahan	215.251.500	165.815.100	77,03
a	Pengadaan Tanah Pemerintah	142.590.000	106.030.500	74,36



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
b	Penanganan Permasalahan/Sengketa Tanah	72.661.500	59.784.600	82,28
TOTAL		215.251.500	165.815.100	77,03

4) Urusan Pendukung

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pendukung Urusan Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pendukung Urusan Perangkat Daerah
Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH			
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000	4.268.500	85,37
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	5.000.000	4.268.500	85,37
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	979.967.200	759.046.982	77,46
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	126.000.000	78.810.750	62,55
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	149.725.400	125.267.722	83,66
c	Penyediaan alat tulis kantor	47.489.500	46.894.500	98,75
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59.044.000	41.729.200	70,67
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.990.900	17.769.500	88,89
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	2.520.000	2.090.000	82,94



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
	undangan			
g	Penyediaan makanan dan minuman	58.560.000	58.294.000	99,55
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99.940.000	99.055.089	99,11
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.760.000	8.090.000	51,33
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	319.418.000	208.128.089	65,16
k	Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum	49.983.000	43.981.982	87,99
l	Penyusunan SPM Pekerjaan Umum	31.536.400	28.936.150	91,75
3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	1.174.196.300	1.142.265.477	97,28
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	37.567.900	32.694.000	87,03
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	57.581.700	54.980.281	95,48
c	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	197.617.500	189.272.921	95,78
d	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	59.976.100	57.040.700	95,11
e	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	79.988.800	79.903.875	99,89
f	Pemeliharaan Gedung - Gedung Pemerintah Daerah	398.851.900	391.708.200	98,21
g	Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakarya	342.612.400	336.665.500	98,26
TOTAL		2.159.163.500,00	1.905.580.959,00	88,26

3.4 AKUTANBILITAS KEUANGAN

Akutanbilas keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.20
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja langsung	113.905.680.770	97.846.123.948	16.059.556.822
2	Belanja Tidak langsung	14.364.056.073	13.787.491.226	576.564.847

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019 untuk total belanja sebesar Rp.128.269.736.843 dengan anggaran terbagi di enam Bidang. Penggunaan anggaran strategis yang mendukung visi misi Bupati dapat dipeinci sebagai berikut

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Pendukung Visi dan Misi Bupati Temanggung

No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	- Persentase jalan kabupaten kondisi mantab (baik dan sedang) - persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten Temanggung	Penyelenggaraan jalan	47,903,085,900	41,091,577,295	94.16
2	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Penyelenggaraan jembatan	14,419,031,300	13,060,479,590	90.58
3	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan jringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	14,303,639,300	11,988,665,728	83.82



No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
4	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1,853,355,500	1,485,216,962	80.14
5	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	Pembinaan jasa konstruksi	40,994,900	26,347,830	64.27
6	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	Penyelenggaraan tata ruang	254,155,200	220,569,192	86.79
7	Persentase kawasan strategis yang dikembangkan	Pengembangan kawasan strategis	0	0	
8	- Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak - Persentase rumah layak huni - Persentase kawasan kumuh perkotaan	Program pengembangan perumahan dan permukiman	4,940,752,900	4,341,253,533	87.87
9	- Cakupan RTH Publik - Persentase penerangan jalan umum di luar jalan kabupaten	Program Pengembangan Dan Penataan Kota	21,247,800,270	18,128,361,848	85.32
10	- Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan - Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkaran Parakan	Program Administrasi Pertanahan	215,251,500	158,951,608	87.87
11	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbang Perangkat Daerah	5,000,000	4,268,500	85.37
12	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	979,967,300	760,956,253	77.65
13	Persentase pemenuhan	Program	1,174,196,300	1,142,258,794	97.28



No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	kebutuhan sarana prasarana aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			

2) Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 13 sasaran menunjukkan sama dari 100% pada sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Analisa Afisiensi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari table dibawah ini :

Table.3.22

Tingkat efisiensi

No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Presentase realisasi anggaran	Presentase realisasi kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6= 4-3
1	- Persentase jalan kabupaten kondisi mantab (baik dan sedang) - persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten Temanggung	Penyelenggaraan jalan	94.16	100	5.84



No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Presentase realisasi anggaran	Presentase realisasi kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6= 4-3
2	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Penyelenggaraan jembatan	90.58	100	9.42
3	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	83.82	100	16.18
4	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	80.14	100	19.86
5	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	Pembinaan jasa konstruksi	64.27	100	35.73
6	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	Penyelenggaraan tata ruang	86.79	100	13.21
7	Persentase kawasan strategis yang dikembangkan	Pengembangan kawasan strategis	0	0	0
8	- Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak - Persentase rumah layak huni - Persentase kawasan kumuh perkotaan	Program pengembangan perumahan dan permukiman	87.87	100	35.73
9	- Cakupan RTH Publik - Persentase penerangan jalan umum di luar jalan kabupaten	Program Pengembangan Dan Penataan Kota	85.32	100	35.73
10	- Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan - Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar Parakan	Program Administrasi Pertanahan	73.84	100	73.84
11	Persentase	Program	85.37	100.00	19.86



No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Presentase realisasi anggaran	Presentase realisasi kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6= 4-3
	penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah			
12	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77.65	100	22.35
13	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.28	100	2.72

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dinilai dapat melaksanakan kegiatan dengan presentase realisasi anggaran dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % yang artinya **Efisien**.



4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjP) SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Patut disyukuri bahwa seluruh Program Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan. Dari Total anggaran tahun 2019 sebesar Rp 113,905,680,770.00 terserap sebanyak Rp 97,846,123,948.00 atau 85.901%, sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp. 16.059.556.822 dari 13 program yang tertuang dalam 92 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

4.2 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Tantangan yang harus dihadapi kedepan antara lain Peningkatan jumlah kegiatan dan anggaran yang disisi lain jumlah anggaran yang tinggi berbanding terbalik dengan keterbatasan jumlah Personel akibat pensiun dan

banyaknya Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Temanggung oleh SKPD lain yang melibatkan personel dari DPUPKP Kabupaten Temanggung.

Tantangan tahun mendatang menuntut perbaikan dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerjanya sehingga tercapai akuntabilitas, produktifitas, efektifitas dan efisiensi yang lebih baik guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*).

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2020
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

JABATAN	PARAF	TGL.
SEKRETARIS		
KABID		
KASI/ KASUBBAG		

HENDRA SUMARYANA, M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720324 199203 1 003

